

ANALISIS PERBANDINGAN APBD DALAM PERSPEKTIF OPTIMALISASI REALISASI ANGGARAN DAN PERHITUNGAN ANGGARAN SISA LEBIH (SiLPA) KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN PEMBIAYAAN 2017-2020

Maria Evana¹⁾, Agus Munandar²⁾

¹Departemen Akuntansi dan Pajak, CV Asia Supply

²Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul

mariaevana123.asia@yahoo.com¹, agus.munandar@esaunggul.ac.id²

ABSTRACT

This research activity is for a comparative analysis of the budget in the perspective of optimizing budget realization and calculating the remaining budget (SiLPA) of the Pekalongan city government's finances for the 2017-2020 fiscal year. Using five ratio analysis to calculate it, namely the degree of decentralization, independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio and growth ratio. This study concludes that the average degree of decentralization in 2017-2020 is 15.45%, the results of regional financial independence have a consultative relationship, regional financial capacity is still low on development in paying regional taxes and levies, the results of the effectiveness and effective efficiency ratios, the ratio average PAD growth of 2.29%, total revenue of 3.37% and spending growth of 2.85%, there was a decrease in the number of SiLPA from 2017-2019 but there was an increase again in 2020 by 2%.

Keyword: Effectiveness, Efficiency, Rationality, SiLPA

ABSTRAK

Kegiatan penelitian ini adalah untuk analisis perbandingan anggaran dalam perspektif optimalisasi realisasi anggaran dan perhitungan sisa anggaran (SiLPA) keuangan pemerintah kota Pekalongan tahun anggaran 2017-2020. Menggunakan lima analisis rasio untuk menghitungnya, yaitu derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rata-rata derajat desentralisasi tahun 2017-2020 adalah 15,45%, hasil kemandirian keuangan daerah memiliki hubungan konsultatif, kemampuan keuangan daerah masih rendah terhadap pembangunan dalam membayar pajak dan retribusi daerah, hasil dari efektivitas dan rasio efisiensi efektif, rasio pertumbuhan PAD rata-rata 2,29%, total penerimaan 3,37% dan pertumbuhan belanja 2,85%, ada penurunan jumlah SiLPA dari tahun 2017-2019 tetapi ada peningkatan kembali di tahun 2020 sebesar 2 %.

Kata Kunci: Efektivitas, Efisien, Rasionalitas, SiLPA

PENDAHULUAN

Perekonomian yang berada di Kota Pekalongan memiliki tingkat ekonomi yang lebih unggul di Provinsi Jawa Tengah, karena memiliki tiga keunggulan yaitu sektor industri, perikanan dan properti. Banyak sumber daya yang dimiliki Kota Pekalongan yaitu pelabuhan terbesar dipulau jawa menjadikan Kota Pekalongan unggul di sektor perikanan yang mendukung tingkat perekonomian daerah terdapat banyak perusahaan yang mengelola hasil laut seperti sarden, ikan asin dan terasi (Sugiyarto, 2019). Hasil karya batiknya yang indah sehingga terkenal hingga mendunia penghargaan dari *UNESCO* (Setyanti, 2015). Kota Pekalongan juga menjadi salah satu daerah yang mendapat penghargaan wilayah bebas korupsi.

UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 16 Ayat 1 tentang merupakan wujud pengelolaan dan pengaturan keuangan daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2003). Pada UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 mengenai pemberian wewenang kepada pemerintah daerah (Indonesia, 2004).

Program-program daerah akan terlaksana dan selesai jika memiliki PAD (Penghasilan Asli Daerah) yang memadai. maka dari itu, pemerintah daerah dituntut untuk terampil dan mampu mengetahui potensi apa yang dimiliki oleh daerah, untuk dijadikan sumber pendapatan dari kekayaan dan sumber daya di Kota Pekalongan, serta mampu bekerja sama dengan pihak lain dengan cara menarik para investor untuk bekerja sama. Kinerja pemerintah daerah dilihat dari seberapa banyak program-program daerah yang sudah terealisasi, menggunakan penghasilan daerah dengan efektif dan efisien. Dengan cara memastikan tersediannya penerimaan dalam jumlah yang cukup APBD dikelola dengan baik agar setiap anggaran yang sudah direncanakan bisa di realisasikan dengan baik dan tuntas,

hal itu harus direncanakan dengan detail dan terperinci oleh pemerintah daerah.

Pengelolaan APBD dijelaskan pada pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah UU Nomor 77 Tahun 2020 mengenai penyusunan, pelaporan dan bertanggung jawab atas laporan keuangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2020). Perencanaan anggaran pemerintah harus ideal yang artinya, penerimaan harus seimbang dengan pengeluaran, jika tidak seimbang antara surplus/defisit maka anggaran dengan pembiayaan netto akan timbul SiLPA, berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 174 tentang Surplus dan Defisit APBD (Indonesia, 2004), penyebabnya terjadi selisih antara pengeluaran dengan anggaran dilakukan dengan penyerapan yang tidak optimal, SiLPA harus dihindarkan karena berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta program-program dapat tidak tercapai. SiLPA dari Tahun 2017 hingga 2019 menurun dan naik kembali pada Tahun 2020, tahun 2017 jumlah SiLPA sebesar Rp.230.082.577.777, lalu mengalami penurunan sehingga jumlah SiLPA Rp.170.561.700.768 pada tahun 2018, pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi Rp. 159.856.594.942 dan di Tahun 2020 meningkat kembali menjadi Rp.163.759.759.877. Dalam laporan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) seharusnya SiLPA menunjukkan angka 0 yang menunjukkan bahwa anggaran digunakan dengan efisien.

Dari kegiatan penelitian yang menjadi rumusan permasalahan yaitu bagaimana hasil PAD berpengaruh terhadap performa kinerja APBD dan tingkat SiLPA daerah Kota Pekalongan dalam empat tahun yaitu 2017-2020 yang diukur menggunakan derajat desentralisasi, serta rasio kemandirian, efektivitas dan efisiensi PAD, serta rasio pertumbuhan. Kegiatan

penelitian ini untuk menganalisis seberapa optimal dalam merealisasikan APBD dan mengetahui pertumbuhan SiLPA dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pekalongan tahun anggaran 2017-2020. Kegiatan penelitian ini dengan cara dokumentasi refrensi dan hasil perhitungan dan peristiwa yang sudah terjadi dalam bentuk numerik dan deskriptif dari data (LKPD) Kota Pekalongan periode 2017-2020, serta informasi-informasi mengenai Kota Pekalongan dari sumber lainnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Kesinambungan antara Perencanaan dengan Penganggaran

UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 179 tentang pengelolaan APBD dalam satu periode anggaran mulai 1 Januari hingga 31 Desember (Indonesia, 2004), APBD tidak terlepas dari kegiatan perencanaan dan penganggaran karena hal itu menjadi proses yang paling penting dalam pembentukan APBD yang dibuat, adanya kesinambungan antara suatu perencanaan dengan penganggaran yaitu, perencanaan yang matang akan terbentuk penganggaran yang tepat, sehingga anggaran yang dibuat bisa efektif dan efisien.

APBD Keuangan Daerah

UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 Huruf (a) tentang sumber pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan sumber daya di daerah (Indonesia, 2004). Rencana keuangan pemerintah daerah dalam satu tahun periode anggaran dapat didefinisikan melalui pembuatan dan perancangan APBD yang sudah memperkirakan pengeluaran yang akan terjadi dalam satu tahun anggaran tersebut, memperkirakan penerimaan yang akan terjadi

dalam satu tahun anggaran tersebut untuk membiayai program-program daerah dan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kinerja dari Keuangan Pemerintah Daerah

Ada beberapa analisis rasio untuk menghitung dan mengukur tingkat dari kinerja keuangan daerah menurut (Information & Hours, 2016) yaitu:

Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi didapat dari jumlah PAD dan total penerimaan daerah, jika ada penerimaan daerah meningkat maka kemampuan daerah juga meningkat untuk membiayai semua anggaran pengeluaran.

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Tingkat Kemandirian Tahun 2017 Sampai 2020 dari Keuangan Daerah Kota Pekalongan

Tingkat keberhasilan memenuhi anggaran-anggaran untuk pengeluaran daerah tanpa mendapat bantuan dari pihak ketiga. Rasio ini membandingkan jumlah dari PAD seberapa banyak mendapatkan bantuan keuangan yang bersumber dari pemerintahan pusat dan pinjaman.

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}}$$

Tingkat penurunan dan kenaikan dari kemandirian serta kemampuan keuangan pada suatu daerah bisa dilihat dan digambarkan dari hasil perhitungan.

Tabel 1. Pola Hubungan Keuangan Kota Pekalongan

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Efektivitas Keuangan Daerah

Mengukur efektivitas daerah untuk mengetahui kekuatan keuangan daerah dalam mengimplementasikan pendapatan daerah.

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill Daerah}}$$

Tabel 2. Efektivitas Keuangan Daerah

Persentase Efektivitas	Kriteria
Sangat Efektif	Diatas 100
Efektif	90-100
Cukup Efektif	80-90
Kurang Efektif	60-80
Tidak Efektif	Dibawah 60

Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur tingkat perbandingan dari besarnya jumlah pengeluaran untuk mendapatkan pendapatan.

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill Daerah}}$$

Tabel 3. Efisiensi Keuangan Daerah

Persentase Efektivitas	Kriteria
Sangat Efektif	Diatas 100
Efektif	90-100
Cukup Efektif	80-90
Kurang Efektif	60-80
Tidak Efektif	Dibawah 60

Rasio Pertumbuhan

Mengetahui tingkat pertahanan dan peningkatan dalam keberhasilan kinerja keuangan daerah.

Rumus Perhitungan PAD:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD Xn-Xn-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD Xn-1}}$$

Rumus Perhitungan Pendapatan:

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Xn-Xn-1}}{\text{Realisasi Pendapatan Xn-1}}$$

Rumus Perhitungan Belanja:

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Xn-Xn-1}}{\text{Realisasi Belanja Xn-1}}$$

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan kuantitatif, penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mendeskripsikan dengan terperinci yaitu: sistematis, faktual dan akurat. Penelitian kuantitatif dimana data-data yang diperoleh bisa diperhitungkan dan digambarkan serta dijelaskan melalui penelitian deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Periode 2017-2020

1. Derajat Desentralisasi

Perhitungan dari jumlah PAD dan total penerimaan daerah.

Tabel 3. Derajat Desentralisasi Kota Pekalongan Periode 2017-2020

Tahun	PAD	Jumlah Pendapatan Daerah	Derajat Desentralisasi (%)
2017	Rp 305,394,299,061	Rp 2,067,907,851,794	14.77%
2018	Rp 311,288,143,682	Rp. 2.101.449.302.497	14.81%
2019	Rp 341,344,415,575	Rp 2,182,770,952,456	15.64%
2020	Rp 341,901,469,549	Rp 2,061,798,474,096	16.58%

(Pemerintah Kabupaten Pekalongan, 2020)

Rasio derajat desentralisasi selama tahun anggaran 2017-2020 mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya. Rata-rata dari rasio derajat desentralisasi dari tahun 2017-2020 sebesar 15,45%.

Kemandirian Keuangan Daerah

Daerah yang mandiri menjadi tolak ukur bahwa keuangan daerah tersebut mampu membiayai sendiri anggaran pengeluaran daerahnya. Melihat tingkat keterlibatan bantuan keuangan dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan pihak eksternal, apakah sudah bisa mengatasi sendiri dalam kegiatan untuk mendapatkan pembiayaan atas program-program serta kebutuhan-kebutuhan daerah.

Tabel 4. Kemandirian Kota Pekalongan Tahun 2017-2020

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
2017	17.55%	Instruktif
2018	18.21%	Instruktif
2019	19.51%	Instruktif
2020	25.17%	Konsultatif

(Pemerintah Kabupaten Pekalongan, 2020)

Rasio kemandirian keuangan pada tahun 2017-2020, Kemandirian keuangan setiap tahunnya meningkat, dari pola hubungan instruktif menjadi pola hubungan konsultatif pada tahun 2020, penurunan bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan eksternal tersebut membuktikan adanya peningkatan dan kemajuan kemandirian keuangan di Kota Pekalongan dalam waktu empat tahun terakhir.

Efektivitas Keuangan Daerah

Tercapainya program-program daerah dilihat seberapa efektivitas pemerintah dalam mengelola dan mengimplementasikan anggaran yang sesuai dengan rencana anggaran. Perencanaan pembangunan berjalan lancar dan terealisasi dengan anggaran pengeluaran sesuai dengan direncanakan pada saat pembuatan APBD.

Tabel 5. Efektivitas Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017-2020

Tahun	Realisasi PAD	Target Rill PAD	Rasio Efektivitas (%)	Pola Hubungan
2017	Rp 305,394,299,060	Rp 300,887,832,132	101.50%	Sangat efektif
2018	Rp 311,288,143,681	Rp 369,095,235,409	84.34%	Efektif
2019	Rp 341,344,415,574	Rp 408,032,305,251	83.66%	Efektif
2020	Rp 341,901,469,549	Rp 378,788,767,484	90.26%	Efektif

(Pemerintah Kabupaten Pekalongan, 2020)

Berikut analisis rasio efektivitas keuangan daerah Kota Pekalongan pada tahun 2017-2020, efektivitas keuangan daerah mengalami penurunan di tahun 2018 dan 2019 lalu persentase efektivitas naik kembali di tahun 2020, penurunan terbesar efektivitas terjadi pada tahun 2019 sebesar 83,66 %.

Efisiensi dari Keuangan Daerah

Tabel 6. Efisiensi Keuangan Daerah Tahun 2017-2020

Tahun	Realisasi Biaya Memperoleh Pendapatan	Realisasi PAD	Rasio Efisien (%)	Pola Hubungan
2017	Rp 336,815,993,533	Rp 305,394,299,060	110,29%	Sangat Efektif
2018	Rp 431,412,970,525	Rp 311,288,143,681	138,59%	Sangat Efektif
2019	Rp 345,165,297,652	Rp 341,344,415,574	101,12%	Sangat Efektif
2020	Rp 239,471,535,400	Rp 41,901,469,549	70,04%	Kurang Efektif

(Pemerintah Kabupaten Pekalongan, 2020)

Efisiensi keuangan daerah Tahun 2017-2020, Pada tahun 2018 efisiensi keuangan daerah mengalami peningkatan sebesar 138,59% dari tahun sebelumnya sebesar 110,29%, namun terjadi penurunan di dua tahun terakhir pada tahun 2019 sebesar 101,12% penurunan drastis terjadi pada tahun 2020 sebesar 70,04%.

Rasio Pertumbuhan Kota Pekalongan

Tabel 7. Pertumbuhan Pendapatan di Kota Pekalongan pada Tahun 2017-2020.

Tahun Anggaran	PAD	Pendapatan Daerah	Belanja
2017	-1,70 %	14%	11%
2018	1,89%	1,60%	5,70%
2019	8,81%	3,73%	1,04%
2020	0,16%	-5,87%	-6,36%

(Pemerintah Kabupaten Pekalongan, 2020)

Hasil dari perhitungan rasio pertumbuhan PAD, total pendapatan dan belanja. PAD menurun tahun 2017 dari tahun sebelumnya sebesar -1,7% dan tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan, peningkatan PAD terbesar yaitu pada tahun 2019 sebesar 8,8%.

SiLPA (Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran)

Adanya selisih defisit anggaran dengan pembiayaan netto, selisih tersebut terjadi karena adanya program-program yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan ditahun berikutnya sehingga timbul SiLPA dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Surya, 2021).

Tabel 8. SiLPA Tahun 2017-2020 pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tahun	SiLPA	% Kenaikan/Penurunan
2017	Rp230,082,577,777	0%
2018	Rp170,561,700,768	-26%
2019	Rp159,856,594,943	-6%
2020	Rp163,759,759,877	2%

(Pemerintah Kabupaten Pekalongan, 2020)

KESIMPULAN

Hasil dari kegiatan penelitian yang sudah dilakukan terhadap kinerja keuangan daerah Kota Pekalongan cukup baik, dilihat dari Derajat desentralisasi yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tingkat kemandirian keuangan Kota Pekalongan selalu meningkat dari hasil persentase kemandirian dan ada perubahan pola hubungan pada tahun 2020 dari instruktif menjadi konsultatif.

Efektivitas keuangan daerah Kota Pekalongan yang belum menunjukkan

kestabilannya persentase efektivitas masih menunjukkan naik turun walaupun tidak mengalami penurunan yang signifikan dan mulai meningkat kembali di tahun 2020 menjadi 90,26%.

Sementara efisiensi keuangan Kota Pekalongan juga mengalami naik turun, tidak seperti hasil rasio efektivitas yang mengalami penurunan namun tidak signifikan berbeda dengan hasil perhitungan rasio efisien yang terjadi penurunan di tahun 2020 sebesar 70,04% terjadi penurunan yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 101,12%.

Pertumbuhan keuangan daerah Kota Pekalongan jika dilihat dari PAD di tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar -1,70%, selanjutnya empat tahun kedepan meningkat dari tahun 2018-2020, kenaikan pertumbuhan PAD tertinggi pada tahun 2019 sebesar 8,81%, dilihat dari jumlah pendapatan mengalami kenaikan dalam tiga tahun yaitu pada tahun 2017 hingga 2019 peningkatan dari rasio pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 3,73% dan tahun 2020 turun menjadi -5,87%, jika dilihat dari jumlah belanja pertumbuhan keuangan daerah Kota Pekalongan mengalami penurunan terhadap realisasi anggaran belanja pada tahun 2020 sebesar 6,36% dari tahun sebelumnya.

Adanya penurunan jumlah SiLPA setiap tahunnya, namun jumlah SiLPA naik kembali pada tahun 2020 Rp.163.759.759.877 dari sebelumnya Rp.159.856.594.943.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. (2004). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH*. <https://www.dpr.go.id/dokjdi/dokument/uu/33.pdf>
- Information, C., & Hours, O. (2016). *Manajemen Kinerja Sektor Publik by Mahmudi*. <https://pingpdf.com/pdf-manajemen-kinerja-sektor-publik-by-mahmudi-ebook-pdf.html>
- Pemerintah Kabupaten Pekalongan. (2020). *LKPD TH. 2019*. <https://pekalongankab.go.id/index.php/publik/dokumen/laporan/lkpd/lkpd-th-2019/196-lkpd>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA* (Issue 1, pp. 1–40). https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386152419.pdf
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah* (pp. 1–445). <https://jdih.blorakab.go.id/archive/PERMENDAGRI-77-2020-PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEU-DAERAH.pdf>
- Setyanti, C. A. (2015). *Alasan Pekalongan Dipilih Jadi Kota Kreatif UNESCO*. www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150601110604-277-56910/alasan-pekalongan-dipilih-jadi-kota-kreatif-unesco
- Sugiyarto. (2019). *Pasar Produk Ikan Asin Kota Pekalongan Tembus ke Sri Langka*. [tribunnews.com/regional/2019/11/28/pasar-produk-ikan-asin-kota-pekalongan-tembus-ke-sri-langka](https://www.tribunnews.com/regional/2019/11/28/pasar-produk-ikan-asin-kota-pekalongan-tembus-ke-sri-langka)
- Surya, P. A. (2021). *Memahami Definisi SILPA*. djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3622-memahami-definisi-silpa.html

